

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. (S.P. Siagian : 2012). Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan yaitu menciptakan kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan kebudayaan yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pembangunan perlu melibatkan masyarakat untuk mendorong lancarnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien karena masyarakat adalah subyek (pelaku) dan sekaligus obyek dalam pembangunan. Suksesnya suatu program dalam pembangunan, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan pembangunan secara baik dan tepat.

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah desa perlu mengupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen dari proses pembangunan desa, oleh karena itu perlu distimulasi terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya upaya pemerintah desa yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Ada beberapa tahapan partisipasi yang dapat dilihat dari tiga tingkat partisipasi masyarakat yaitu tingkat tanpa partisipasi (non participation) meliputi (1) manipulasi (2) Terapi, dimana menjelaskan tentang tidak adanya keterlibatan atau keikutsertaan dalam proses pembangunan, tingkatan tokenisme meliputi (3) menginformasikan (informing), (4) konsultasi (consultation), dan (5) penentruman (placation), dimana dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan, selanjutnya tingkat kekuasaan masyarakat meliputi (6) kemitraan (partnership), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (delegated power), dan (8) pengawasan masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. (Sheryy Arnsitein 1969).

Untuk itu, Pemerintah desa perlu berupaya dalam mendorong munculnya rasa partisipasi masyarakat dalam pemangunan karena pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting terhadap akselerasi atau percepatan pelaksanaan implementasi dari berbagai tahapan pembangunan. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas

pembangunan di desa Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat.

Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, partisipasi dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2004). Dengan partisipasi dan peran serta di sini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada sebagai salah satu desa yang sedang melaksanakan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Untuk itu pemerintah desa berusaha untuk mengupayakan agar masyarakat dapat termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Upaya tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendorong munculnya rasa partisipasi masyarakat desa Niolewa dalam setiap pembangunan desa yang dilakukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Niolewa, akan terlaksana dengan baik bilah peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik.

Oleh karena itu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Niolewa sangat penting demi kelancaran pembangunan di Desa dan partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi akan sangat membantu pemerintah desa demi kelancaran pembangunan di Desa Niolewa.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap pembangunan di desa Niolewa, terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa Niolewa, serta kurang sadarnya masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang desa, kurangnya keterbukaan pemerintah desa terkait anggaran kepada masyarakat, tidak ada kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap masyarakat tentang perlunya pembangunan desa yang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah sebagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Tabel 1.1

Data Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Jumlah Kehadiran Partisipasi Masyarakat	Persen (%)
1.	2018	Musrenbang	95	1,39%
2.	2019	Musrenbang	72	1,05%
3.	2020	Musrenbang	75	1,10%
4.	2021	Musrenbang	80	1,17%

Sumber: Kantor Desa Nio Lewa, 2022

Di lihat dari tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 1,39% dengan jumlah kehadiran masyarakat 95 orang, pada tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat menurun 1,05% dengan jumlah kehadiran masyarakat 72 orang, pada tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat sedikit meningkat di angka 1,10% dengan jumlah kehadiran masyarakat mencapai 75 orang dan tingkat

partisipasi masyarakat mulai mengalami peningkatan di awal tahun 2021 saat ini, yaitu hanya mencapai 1,17% dengan jumlah kehadiran masyarakat 80 orang yang berpartisipasi. Dari hasil pengamatan awal calon peneliti, faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi (keadaan tidak tetap) tingkat kehadiran partisipasi masyarakat yaitu karena informasi tentang program pemerintah tidak selamanya diserap oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Minimnya partisipasi masyarakat disetiap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta minimnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada.

Melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pentingnya upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemangunan desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dipaparkan berdasarkan tujuan yang dikemukakan adalah:

1. Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1)
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa terkait pentingnya upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Niolewa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada
4. Sebagai bahan atau dokumen untuk program Studi Administrasi Publik sebagai referensi bagi peneliti lanjutan